



Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi

Anandra Triwidodo, Frinanda Wijaya Hsb, Ahmad Baidawi, Ahmad Fadillah Zurdi, Rachmaddatur Rizky Fadilla, Rts. Aura Miftahul Jannah, Rafika Farma, Universitas Jambi; ahmad.baidawi@unja.ac.id

Abstract

Penelitian ini membahas peran penting masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi di Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan mereka dalam mendeteksi dan mengurangi praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya diperlukan secara empiris untuk mengurangi risiko korupsi, tetapi juga memiliki aspek normatif yang kuat dalam menjaga demokrasi dan membangun budaya anti-korupsi. Masyarakat sipil berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan budaya korupsi yang mengakar, inisiatif masyarakat sipil, seperti program advokasi dan pendidikan publik, telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Keywords

Mitigasi Korupsi, Masyarakat Sipil, Partisipasi

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Menurut Kontjaraningrat dalam Effendy (1998), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Ahli sosiolog Amerika, Coleman (1998) dalam Tamboto& Manongko (2019) mengatakan bahwa society is not a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure. Sementara Ralph Linton (1956) dalam Satria (2015) mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Soerjono Soekanto dalam Hetharia, dkk (2016) menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas beberapa



unsur, yaitu (1) beranggotakan minimal dua orang, (2) anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, (3) berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan gubungan antaranggota masyarakat, serta (4) menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan mitigasi korupsi adalah upaya sistematis untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi dalam suatu sistem atau organisasi. Ini melibatkan serangkaian tindakan proaktif yang dirancang untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik maupun swasta.

Langkah-langkah mitigasi korupsi bisa berupa penerapan sistem manajemen risiko, peningkatan tata kelola yang baik, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan anti-korupsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi dan memperkuat kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan merespons potensi pelanggaran secara efektif.

Dalam konteks pemerintahan, mitigasi korupsi sering melibatkan reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur perizinan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, mitigasi korupsi diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan lingkungan bisnis yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian terdahulu, banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam ikut serta menanggulangi korupsi seperti, peran serta melalui media, Justice Collaborators, Perlindungan bagi saksi atau pelapor oleh LPSK, kegiatan-kegiatan langsung dan melalui pendidikan anti korupsi.

Masyarakat berperan sebagai pencegah korupsi. Pemerintah Indonesia lebih fokus pada penindakan dalam upaya memberantas korupsi. Ini juga menjadi pandangan umum di masyarakat bahwa pendekatan tersebut dianggap efektif untuk menimbulkan efek jera. Tetapi kenyataannya, korupsi masih sering terjadi secara besar-besaran dan terorganisir, baik di pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perusahaan milik negara, maupun dalam kehidupan masyarakat serta bangsa. Karena itu, semua orang perlu menggunakan strategi pencegahan yang lengkap, termasuk strategi pendidikan. Strategi edukatif bertujuan untuk mengurangi korupsi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi sesuai dengan kemampuan dan wewenang mereka.

Masyarakat harus mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi kepada generasi muda melalui pesan moral dan pendidikan etika, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Diharapkan dengan langkah ini, budaya korupsi yang merugikan masyarakat dapat dikurangi, dan generasi penerus bangsa akan tumbuh dengan integritas yang tinggi serta semangat anti korupsi. Langkah konkret untuk mencegah korupsi adalah dengan mengajarkan dan mengingatkan agar tidak melakukan tindakan koruptif sehari-hari. Contohnya adalah datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta memiliki disiplin yang baik. Pencegahan ini akan memberikan dampak positif dalam upaya memerangi korupsi, seperti yang disampaikan oleh Pradipto (2009) dalam Alfaqi dan Habibi (2017), bahwa pencegahan dan tindakan preventif lebih efektif dalam menangani korupsi daripada mengandalkan tindakan hukuman yang keras.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Masyarakat hendaknya tidak dijadikan objek penyelenggaraan negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subyek. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam usaha menanggulangi kejahatan yang merusak negara Indonesia. Keaktifan dari masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggaraan negara dalam memberantas korupsi. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan merupakan elemen terpenting dalam pemberantasan korupsi. Tanpa dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, segala upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa risiko korupsi di sektor perizinan, tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk mengawal dan

mencegah praktik korupsi ini. Namun, partisipasi masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi masih dianggap cenderung rendah. Selain itu, implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 juga membutuhkan monitoring dan evaluasi dari masyarakat sipil untuk memastikan implementasinya efektif. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam menjaga keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Faktor budaya juga sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Jika korupsi telah membudaya atau masyarakat permisif terhadap praktik korupsi, maka pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, menumbuhkan budaya anti-korupsi di Indonesia adalah suatu agenda besar yang tidak hanya dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum, melainkan juga harus melibatkan komponen bangsa, khususnya masyarakat sipil.

Dalam keseluruhan, keterlibatan masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi tidak hanya diperlukan secara empiris karena risiko korupsi yang tinggi, tetapi juga memiliki aspek normatif yang kuat dalam menjaga demokrasi, mengembangkan budaya anti-korupsi, dan memenuhi hak dan tanggung jawab masyarakat. Dengan kesadaran dan partisipasi yang lebih aktif, kita dapat mengurangi risiko korupsi dan membangun negara yang lebih adil dan transparan.

2. METHOD

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel, dan jurnal yang membahas isu korupsi serta peran masyarakat sipil. Selain itu, dokumen resmi seperti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga menjadi bagian penting dari sumber data. Penulis juga merujuk pada laporan dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi terkait yang berfokus pada isu ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur review, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan. Penulis menganalisis

dokumen resmi dan laporan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi serta peran masyarakat sipil. Selanjutnya, penulis melakukan pengelompokan sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang diteliti. Penulis berfokus pada tantangan yang dihadapi masyarakat sipil, efektivitas keterlibatan mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya anti-korupsi. Melalui integrasi informasi dari berbagai sumber, penulis berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi, serta tantangan yang mereka hadapi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya peran masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya melawan korupsi.

3. RESULT DAN DISCUSSION

Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mendeteksi Dan Mengurangi Praktik Korupsi Di Sektor Publik

Masyarakat sipil memiliki beberapa peran dalam upaya mendeteksi dan mengurangi praktik tindak pidana korupsi di sektor publik Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam mitigasi korupsi dengan memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan ahli yang terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan fisik, identitas, serta bantuan hukum untuk mencegah intimidasi atau ancaman yang dapat menghambat proses hukum. Dengan melindungi pihak-pihak penting dalam kasus korupsi, LPSK membantu memastikan pengungkapan dan penuntutan kasus dapat berjalan tanpa tekanan eksternal.

Kedua, peran serta melalui Justice Collaborators. Justice collaboratorsialah saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses persidangan.

Justice Collaborator merupakan salah satu elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Dengan memberikan informasi yang berharga kepada aparat penegak hukum, mereka berkontribusi pada pembongkaran jaringan kejahatan dan pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, pengelolaan Justice Collaborator harus dilakukan secara profesional dan adil, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka, sambil tetap menegakkan prinsip keadilan dalam proses hukum.

Ketiga, partisipasi melalui media. Menggunakan koran, majalah, radio, dan televisi adalah cara efektif untuk mencegah dan mengatasi korupsi. Dugaan kasus korupsi di lembaga pemerintah atau oleh pejabat negara dapat dilaporkan melalui media. Melalui media, masyarakat atau LSM juga dapat menyampaikan dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal terkait lainnya. Contohnya, melalui surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon. Masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat menggunakan internet, yang dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran agar mereka dapat mendukung agen dan gerakan antikorupsi di mana pun berada.

Melalui media, orang biasa dan LSM bisa memberikan informasi atau melaporkan dugaan korupsi. Ini bisa dilakukan dengan cara menulis surat pembaca, mengirim pendapat, mengisi kolom pembaca, atau menggunakan layanan telepon khusus yang disediakan media untuk menerima informasi dari masyarakat. Surat kabar dan majalah sering memberikan tempat bagi kritik dan pendapat masyarakat tentang korupsi yang kemudian bisa didengar oleh banyak orang. Selain media tradisional, teknologi informasi juga bisa digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Internet sangat berguna dalam menyebarkan pesan antikorupsi kepada audiens global. Banyak individu dan organisasi telah menggunakan internet sebagai alat yang efektif untuk tujuan tersebut. Melalui situs web, blog, atau platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, orang-orang dapat berbagi informasi tentang dugaan korupsi, menyebarkan kampanye edukatif, atau memberikan dukungan kepada agen dan gerakan antikorupsi di banyak tempat.

Contohnya, orang dapat menggunakan media sosial untuk membuat gerakan bersama yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Hashtag seperti #LawanKorupsi atau #SaveKPK sering digunakan untuk mendapatkan

dukungan dari masyarakat dan menuntut agar pihak berwenang segera bertindak tegas terhadap kasus korupsi. Media digital memungkinkan orang untuk melaporkan korupsi secara anonim melalui situs internet khusus atau aplikasi yang dikelola oleh pemerintah atau LSM.

Keempat, partisipasi melalui kegiatan langsung. Kegiatan langsung oleh sekelompok orang untuk upaya penanggulangan korupsi disebut kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa dilakukan di lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi di lembaga KPK untuk mendorong penanganan kasus korupsi dengan serius. Organisasi masyarakat saat ini banyak yang terlibat dalam upaya penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Berikut beberapa lembaga swadaya masyarakat tersebut yaitu: Indonesian Corruption Watch (ICW) atau disingkat ICW merupakan sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia; Transparency International Indonesia (TII) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil.

Partisipasi melalui kegiatan langsung merupakan salah satu pilar penting dalam penanggulangan korupsi. Melalui aksi protes yang terorganisir, kampanye publik, hingga keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat sipil, masyarakat dapat memberikan tekanan yang kuat terhadap pemerintah untuk bertindak lebih serius dalam memberantas korupsi. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan lembaga pemerintahan, serta kesadaran kolektif untuk menciptakan perubahan sistemik yang berkelanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kelima, peran serta Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Pendidikan anti-korupsi sangat penting. Ini membantu membentuk integritas, meningkatkan kesadaran, dan mengembangkan kemampuan kritis di masyarakat. (Rachman et al., 2011). Tidak bisa diabaikan bahwa korupsi telah menjadi masalah global yang mengganggu banyak negara. Hal ini merusak dasar demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Rowa, 2015). Korupsi, dalam berbagai bentuknya, merusak struktur dan perekonomian suatu negara (Ulum & Ngindana, 2017). Dampaknya tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kesulitan dalam mengakses layanan publik yang adil, tetapi juga menghalangi masuknya investasi serta membuka peluang untuk meningkatkan ketidaksetaraan (Afandi & Afandi, 2018). Karena itu, pendidikan anti-korupsi berperan penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, transparan, dan berintegritas.

Dalam situasi ini, pendidikan anti-korupsi menjadi sangat penting. Mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko dan konsekuensi korupsi terhadap masyarakat dan negara dapat dilakukan melalui pendidikan yang cermat. Pendidikan ini dapat membentuk karakter dan moral yang kuat serta menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin yang jujur dan tanggung jawab. Pendidikan anti-korupsi mengajarkan kemampuan penting dalam mengenali, menganalisis, dan mengatasi keadaan korupsi dengan cerdas (Lickona, 2022). Oleh karena itu, program pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berkomitmen dalam mencegah korupsi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah korupsi dan konsekuensinya, individu akan cenderung berperilaku dengan integritas dan memilih jalur yang benar ketika dihadapkan pada godaan korupsi. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk membentuk pemimpin masa depan yang memiliki moralitas tinggi, berkontribusi dalam pemerintahan yang transparan, dan mampu mengarahkan negara ke pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat nilai integritas, meningkatkan kesadaran, dan mengasah keterampilan kritis, pendidikan anti-korupsi mendorong partisipasi aktif dalam perubahan paradigma dan penanggulangan akar permasalahan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan ini, korupsi dapat diatasi lebih efektif dan masyarakat akan menjadi lebih bijak, moral, dan terintegritas. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, target yang baik ini bisa tercapai, membawa efek positif yang dirasakan dalam semua area kehidupan.

Tantangan Dalam Upaya Mitigasi Korupsi dan Efektivitas Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah

Di tengah upaya global untuk memberantas korupsi, peran masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Berbagai tantangan yang sering dihadapi dapat menghambat upaya dalam mengurangi korupsi. Masyarakat sipil, yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perubahan positif. Mereka bukan hanya berperan sebagai pengawas independen, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka serta mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti pengawasan kebijakan publik, kampanye sosial, hingga penyuluhan kepada masyarakat, mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya negara dan pelayanan publik. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Walaupun peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi diakui secara luas, mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan daya jangkauan upaya mereka.

Salah satu masalah utamanya adalah pembatasan keterlibatan. Banyak negara menerapkan regulasi ketat yang membatasi gerak organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan dan advokasi. Dalam beberapa situasi, kebijakan yang tidak mendukung partisipasi masyarakat justru menciptakan pemisahan antara pemerintah dan rakyat. Ini menyebabkan suara masyarakat sulit didengar. Selain itu, Aktivis anti-korupsi dan pejuang hak asasi manusia sering kali menjadi sasaran intimidasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Ancaman terhadap keselamatan pribadi ini menjadi penghalang yang sangat besar bagi banyak individu dan kelompok yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah dengan tingkat korupsi yang tinggi sering menghadapi intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya mereka. Ketidakpastian terkait keselamatan ini menciptakan ketakutan yang meluas, yang akhirnya dapat memadamkan semangat aktivisme dan

menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Keterbatasan sumber daya juga merupakan tantangan yang penting. Banyak organisasi masyarakat sipil, terutama yang berfokus pada pengawasan dan pemberantasan korupsi, harus beroperasi dengan dana yang terbatas. Sumber daya yang terbatas ini sering kali membatasi kemampuan mereka untuk melakukan monitoring yang menyeluruh atau mengevaluasi kebijakan publik dengan tepat. Selain dana yang tidak mencukupi, organisasi-organisasi ini juga seringkali kekurangan infrastruktur yang memadai, seperti teknologi, data, atau sistem yang dapat membantu mereka mengumpulkan informasi secara efisien. Bahkan, kekurangan dalam kapasitas manusia juga menjadi hambatan besar, karena banyak organisasi bergantung pada sukarelawan yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian. Dengan demikian, meskipun mereka memiliki niat yang kuat untuk memberantas korupsi, keterbatasan sumber daya ini mengurangi kemampuan mereka untuk beroperasi secara efektif dan memberi dampak yang lebih besar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya mitigasi korupsi tetap menunjukkan efektivitas yang signifikan. Mereka berperan sebagai fasilitator *good governance*, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, mereka ikut berperan dalam menciptakan lingkungan di mana pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Tantangan yang lebih mendalam yang dihadapi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah budaya korupsi yang sudah mengakar di dalam struktur masyarakat dan pemerintahan. Dalam banyak kasus, praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh, praktik suap dalam pelayanan publik, seperti di sektor kesehatan atau pendidikan, telah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Dalam hal ini, masyarakat sipil tidak hanya menghadapi tantangan untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi, tetapi juga berjuang melawan paradigma sosial yang menganggap korupsi sebagai cara untuk bertahan hidup atau beroperasi dalam sistem yang penuh dengan ketidakadilan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tentang pengaruh budaya terhadap pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa dalam masyarakat

dengan budaya yang permisif terhadap korupsi, masyarakat sipil cenderung mengalami kesulitan untuk menggalang dukungan yang cukup luas untuk gerakan anti-korupsi akibatnya, meskipun masyarakat sipil berusaha melakukan perubahan, banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang tetap terjebak dalam kebiasaan lama yang memungkinkan korupsi berlangsung.

Peran masyarakat sipil sangat penting dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokratis. Mereka bertindak sebagai penghubung untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada para pengambil keputusan. Ini memungkinkan pemerintah mendengar suara rakyat secara langsung dan memahami prioritas serta kekhawatiran mereka. Sebagai saluran komunikasi, masyarakat sipil dapat membantu memastikan kebijakan pemerintah lebih akuntabel, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, masyarakat sipil membantu mengingatkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan pengaruhnya pada masyarakat. Mereka juga menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang sering diabaikan oleh pemerintah, seperti masyarakat marginal, kelompok minoritas, atau orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Dengan berbagai cara advokasi dan kampanye publik, masyarakat bisa membantu menyoroti isu-isu penting yang tidak cukup diperhatikan. Kampanye bisa berupa petisi, demo, lobi kebijakan, atau diskusi publik melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mereka bisa menyerukan kebijakan yang menyertakan semua orang, adil, dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2012 di Indonesia terjadi gerakan #SaveKPK. Gerakan ini menunjukkan bagaimana orang-orang dapat bergabung dan memaksa pemerintah untuk melindungi lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini efektif dalam mencegah upaya kriminalisasi yang dapat merugikan KPK. Gerakan ini menunjukkan betapa suara rakyat yang disuarakan melalui masyarakat sipil dapat memengaruhi pemerintah untuk melindungi dan memperkuat institusi yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi.

Tak kalah pentingnya adalah peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik. Masyarakat sipil dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi kepentingan politik atau ekonomi semata, tetapi juga untuk kepentingan rakyat. Salah satu cara masyarakat sipil melakukan pengawasan adalah dengan

mengawasi praktik politik uang, yang sering digunakan untuk mempengaruhi keputusan pemilu atau kebijakan pemerintah. Dengan laporan, investigasi, atau media sosial, warga bisa temukan dan beritahukan tindakan ilegal. Ini bantu polisi ambil langkah yang diperlukan. Masyarakat biasa juga bisa melaporkan sumbangan yang tidak jelas atau berpotensi merugikan kepada pihak berwenang. Dengan melakukan hal ini, mereka turut berpartisipasi dalam meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses politik dan pemerintahan.

Keberhasilan keterlibatan masyarakat sipil dalam melawan korupsi terlihat dalam program pemberdayaan yang dilakukan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Penilaian Risiko Korupsi yang dilakukan oleh LSM di Sulawesi Tengah. Di daerah ini, masyarakat biasa berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kemungkinan korupsi dan efek negatifnya. Mereka juga mengenalkan cara menilai risiko korupsi kepada masyarakat agar bisa mencegah korupsi di lingkungan mereka, baik di pemerintahan daerah maupun sektor lainnya. Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah korupsi dan memberi mereka keterampilan serta pengetahuan agar dapat turut serta dalam upaya mencegah dan mengatasi korupsi. Dengan mengetahui risiko korupsi, orang dapat lebih mudah menemukan tanda-tanda korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Terlebih lagi, dengan pemahaman yang semakin meningkat tentang dampak sosial dan ekonomi dari korupsi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta mendukung gerakan anti-korupsi secara penuh.

Secara garis besar, keterlibatan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi tidak hanya berdampak positif pada kebijakan, tetapi juga membantu mengubah budaya dan pandangan masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat umum, dengan berbagai cara ikut serta aktif, seperti mengawasi kebijakan, membela perubahan hukum, dan memberdayakan masyarakat, memiliki peran yang besar dalam membuat pemerintahan lebih terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat sipil dapat bekerja di lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan partisipasi, mereka dapat berperan penting dalam menciptakan perubahan besar dalam upaya memberantas korupsi.

4. CONCLUSION

Keterlibatan masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi di Indonesia merupakan elemen yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai pengawas independen, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam mendukung masyarakat tentang hak-hak mereka dan mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui berbagai inisiatif, masyarakat sipil berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, meningkatkan kesadaran akan isu-isu korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

5. REFERENCES

- Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 93-106.
- Kafrawi, M., & Hatimah, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Berbasis Corruption Risk Assesment. *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 42-50.
- Rahmat, Yudi. Peran Masyarakat Sipil Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi. 25 Maret 2021. 01 Oktober 2024.
- Rezayana, Annisa. "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi : Studi Kasus Indonesia Corruption watch (ICW) Tahun 2014." Universitas Diponegoro (2014): 20.
- SULISTYO, PRAYOGI DWI. Masyarakat Sipil Berperan Besar dalam Pemberantasan Korupsi. 24 Maret 2021. 01 Oktober 2024.
- Suyatmiko, Wawan. PEMERINTAH HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI. 24 Juli 2019. 01 Oktober 2024.
- Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128-142.
- Effendy, N. 1998. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.

Tamboto, H. J., Si, M., & Manongko, A. A. C. 2019. Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial. Malang: Seribu Bintang.

Satria, A. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.